



PROSIDING

Konferensi Nasional Komunikasi

Implementasi Teori Pers dalam Pemberitaan Harian Republika

Iqbal¹

¹Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Jl. Hang Lekir 1 No. 8, Jakarta – Indonesia
iqbalmbez@yahoo.co.id

Abstract

The daily newspaper Republika is a national newspaper that was created by the Muslim community for the republic of Indonesia. The republika daily was published with the intention of creating mass media capable of encouraging the nation to be critical and of quality, namely a nation capable of being equal to other developed nations in the world, holding spiritual values in the form of Pancasila as the nation's philosophy, and having a direction of movement as outlined in the 1945 Constitution. This newspaper is synonymous with ICMI because it was founded by the Indonesian Muslim Intellectuals Association, which is known among the people of Republika as a national newspaper that accommodates Islamic interests. Judging from the background of the general daily newspaper Republika itself, which is based on the Indonesian Muslim community, of course the republika will be limited in reporting about Islam by the government. The theory that is often referred to as an authoritarian system is closely related to the monitoring system of the mass media whose influence is considered very strong, so that the press is nicknamed the four estate (the fourth power) after the legal, executive and judicial institutions are recognized as the first, second and second powers, respectively. third. Qualitative scientific papers tend to be descriptive because they try to provide an overview / explanation using words, and present problems or outline stages. The theory used in this scientific paper is the four theory of the press (4 theories of the press).

Keywords: Newspapers, Press, The four theories of press

Abstrak

Surat kabar harian Republika adalah koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim bagi republic Indonesia. Harian umum republika diterbitkan atas kehendak mewujudkan media massa yang mampu mendorong bangsa menjadi kritis dan berkualitas, yaitu bangsa yang mampu sederajat dengan bangsa maju lain di dunia, memegang nilai-nilai spiritualitas dengan wujud Pancasila sebagai filsafat bangsa, serta memiliki arah gerak seperti digariskan UUD 1945. Koran ini identik dengan ICMI karena memang didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dikalangan masyarakat Republika dikenal sebagai Koran nasional yang mengakomodasi kepentingan Islam. Dilihat dari latar belakang surat kabar harian umum republika sendiri yang berlandaskan dari komunitas kalangan muslim Indonesia tentu saja republika akan dibatasi pemberitaan tentang islam oleh pemerintah. Teori yang seringkali disebut sebagai sistem otoriter berkaitan erat dengan sistem pengawasan terhadap media massa yang daya pengaruhnya dinilai amat kuat, sehingga pers dijuluki *the four estate* (kekuasaan keempat) setelah Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif masing-masing diakui sebagai kekuasaan pertama, kedua, dan ketiga. Paper ilmiah yang bersifat kualitatif cenderung bersifat deskriptif karena berusaha untuk memberikan gambaran/penjelasan dengan menggunakan kata-kata, serta menyajikan persoalan atau garis besar tahapan. Teori yang di pakai dalam paper ilmiah ini adalah *four theory of the press* (4 teori pers).

Kata Kunci : Surat Kabar, Pers, The four theories of press

Pendahuluan

Pada awalnya surat kabar sering kali diidentikkan dengan pers, namun karena pengertian pers sudah luas, dimana media elektronik sekarang ini sudah dikategorikan dengan media juga. Untuk itu pengertian pers dalam arti sempit, pers hanya meliputi media cetak saja, salah satunya adalah surat kabar.

Menurut Onong Uchjana Effendy, “Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca”. Selain itu surat kabar mampu menyampaikan sesuatu setiap saat kepada pembacanya melalui surat kabar pendidikan, informasi dan interpretasi mengenai beberapa hal, sehingga hampir sebagian besar dari masyarakat menggantungkan dirinya kepada pers untuk memperoleh informasi.

Pers Indonesia dimulai Sejak dibentuknya Kantor berita ANTARA didirikan tanggal 13 Desember 1937 sebagai kantor berita perjuangan dalam rangka perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia, yang mencapai puncaknya dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kantor berita Antara didirikan oleh Soemanang saat usia 29 tahun, A.M. Sipahoentar saat usia 23 tahun, Adam Malik saat berusia 20 tahun dan Pandu Kartawiguna. Adam Malik pada usia 21 tahun diminta untuk mengambil alih sebagai pimpinan ANTARA, dikemudian hari Ia menjadi orang penting dalam memberitakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Karena kredibilitasnya, Adam Malik setelah menduduki jabatan semula sebagai ketua Kantor berita Antara, ia diangkat sebagai Menteri Perdagangan, Duta Besar, Menteri Utama Bidang Politik, Menteri Luar Negeri, Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Ketua DPR/MPR dan Wakil Presiden.

Kemerdekaan pers berasal dari kedaulatan rakyat dan digunakan sebagai perisai bagi rakyat dari ancaman pelanggaran HAM oleh kesewenang-wenangan kekuasaan atau uang. Dengan kemerdekaan pers terjadilah *check and balance* dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Kemerdekaan pers berhasil diraih, karena keberhasilan reformasi yang mengakhiri kekuasaan rezim Orde Baru pada tahun 1998.

Pembahasan RUU pers terakhir 1998 dan awal 1999 yang kemudian menjadi UU no. 40 Tahun 1999 tentang pers sangat gencar. Independensi pers, dalam arti jangan ada lagi campur tangan birokrasi terhadap pembinaan dan pengembangan kehidupan pers nasional juga diperjuangkan oleh kalangan pers. Komitmen seperti itu sudah diusulkan sejak pembentukan Persatuan Wartawan Indonesia PWI tahun 1946. Pada saat pembahasan RUU pers itu di DPR-RI, kalangan pers dengan gigih memperjuangkan independensi pers.

The four theories of press merupakan teori awal mengenai pers dan jurnalistik yang dipublikasikan secara luas pertama kali pada tahun 1956 oleh Wilburm Schraamm, Fred.S. Siebert dan Theodore Peterson. Teori pers ini menggambarkan bahwa pers menggambarkan keadaan sosial politik dalam suatu masyarakat. Hal ini dikarenakan pers merefleksikan sistem dan control sosial mengenai hubungan antara individu dan institusi. Keempat teori ini sesungguhnya hanyalah perkembangan dari dua teori terdahulunya, seperti Totalitarian yang merupakan perkembangan dari Authoritarian, sedangkan Social Responsibility Theory (SRT) merupakan perkembangan dari teori pers libertarian.

The four theories of press dikategorikan sebagai teori normative dikarenakan teori-teori ini mendeskripsikan norma; sesuatu yang seharusnya; kondisi idealnya. Teori normative memberikan gagasan mengenai bagaimana media harus dikelola dan bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan berkontribusi terhadap sistem politik (secara luas) dimana teori pers itu berlaku. Meski teori normative merupakan gambaran ideal bagaimana media dalam masyarakat bertindak, namun terdapat berbagai penyimpangan (di luar tujuan awal yang ideal). Oleh karena itu tulisan ini berniat untuk melakukan tinjauan literatur mengenai kelebihan dan kekuarangan dari the four theories of press atau yang dikenal juga dengan Teori Normatif Media tahap awal.

Kerangka Teori

Pers otoriter

Teori otoriter adalah pers yang mendukung dan menjadi kepanjangan tangan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa dan melayani negara. Teori ini muncul setelah mesin cetak ditemukan dan menjadi dasar perkembangan pers komunis soviet. Dikenal sebagai sistem tertuayang lahir sekitar abad 15-16 pada masa pemerintahan absolut. saat itu , apa yang disebut kebenaran (truth) adalah milik beberapa gelintir penguasa saja. Karena itu fungsi pers adalah dari puncak turun kebawah.

Ketika dasar dan teori pers pertama mendukung dan menjadi kepanjangan tangan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa dan melayani negara. Mesin cetak harus memiliki izin dalam beberapa kondisi harus mendapat hak ijin pemakaian khusus dari kerajaan atau pemerintah agar bisa digunakan dalam penerbitan. Melalui penerapan hak khusus, lisensi, sensor langsung, dan peraturan yang diterapkan sendiri dalam tubuh serikat pemilik mesin cetak, individu jauhkan dari kemungkinan mengkritik pemerintah yang berkuasa. Dalam sistem otoriter, pers bisa dimiliki baik secara publik maupun perorangan, namun demikian, tetap dianggap sebagai alat untuk menyebarkan kebijakan pemerintah.

Pers lebih digunakan untuk memberi informasi kepada rakyat mengenai apa yang penguasa pikirkan, apa yang mereka inginkan, dan apa yang harus didukung oleh rakyat. Berbagai kejadian yang akan diberitakan dikontrol oleh pemerintah karena kekuasaan raja sangat mutlak. Negara dengan raja sebagai kekuatan adalah pusat segala kegiatan. Oleh karena itu, individu tidak penting, yang lebih penting adalah negara sebagai tujuan akhir individu. Benito Mussolini (Italia) dan Adolf Hitler (Jerman) adalah dua penguasa yang mewarisi sistem pers otoriter.

Pers Liberal

Sistem pers liberal (libertarian) berkembang pada abad ke 17-18 sebagai akibat munculnya revolusi industri, dan adanya tuntutan kebebasan pemikiran di negara barat yang disebut aufklarung (pencerahan). Teori ini berkembang sebagai dampak dari masa pencerahan dan teori umum tentang rasionalisasi serta hak-hak alamiah dan berusaha melawan pandangan yang otoriter. Esensi dasar sistem ini memandang manusia mempunyai hak asasi dan meyakini bahwa manusia akan bisa mengembangkan pemikirannya secara baik jika diberi kebebasan.

Manusia dilahirkan sebagai makhluk bebas yang dikendalikan akal dan bisa mengatur sekelilingnya untuk tujuan yang mulia. Kebebasan adalah hal yang utama untuk mewujudkan esensi dasar itu, sedangkan control pemerintah dipandang sebagai manifestasi “pemeriksaan” kebebasan berpikir. Oleh karena itu, pers harus diberi tempat yang sebebas-bebasnya untuk mencari kebenaran. Kebenaran akan diperoleh jika pers diberi kebebasan sehingga kebebasan pers menjadi tolak ukur dihormatinya hak bebas yang dimiliki oleh manusia.

Teori liberal pers berkembang di Inggris selama abad ke 18 tetapi tidak diperbolehkan dijalankan di koloni Inggris di Amerika Utara sampai putus hubungan dengan Negara induk tersebut. Setelah tahun 1776, teori ini diimplementasikan diseluruh wilayah yang lepas dari pemerintahan colonial dan secara resmi diadopsi dengan adanya Amendemen pertama pada piagam Hak Asasi Manusia baru yang ditambahkan ke dalam Undang-undang dasar. Dari tulisan Milton, Locke, dan Mill dapat dimunculkan sebagai pemahaman bahwa pers harus mendukung fungsi membantu menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintah sekaligus sebagai media yang memberikan informasi, menghibur, dan mencari keuntungan. Di bawah teori liberal, pers bersifat swasta, dan siapa pun yang mempunyai uang yang cukup dapat menerbitkan media. Media dikontrol dalam dua cara. Dengan beragamnya pendapat “proses pembuktian kebenaran” dalam “pasar bebas gagasan” akan memungkinkan individu membedakan mana yang benar dan yang salah. Demikian pula dengan sistem hukum yang memiliki ketentuan untuk menindak tindakan fitnah, tindakan senonoh, ketidaksopanan, dan hasutan dalam masa peperangan.

Pers Tanggung Jawab Sosial

Muncul pada abad ke 20 sebagai protes terhadap kebebasan mutlak dari libertarian yang mengakibatkan kemerosotan moral masyarakat. Di abad ini, ada gagasan yang berkembang bahwa media satu-satunya yang dilindungi piagam hak asasi manusia, harus memenuhi tanggung jawab sosial. Teori tanggung jawab sosial, yang merupakan gagasan evolusi praktisi media, dan hasil kerjakomisi kebebasan pers (Commission on Freedom of The Press), berpendapat bahwa selain bertujuan untuk memberikan informasi, menghibur, mencari untung (seperti hal teori liberal), juga bertujuan untuk membawa konflik ke dalam arena diskusi.

Teori tanggung jawab sosial mengatakan bahwa, setiap orang yang memiliki suatu yang penting untuk dikemukakan harus diberikan hak dalam forum, dan jika media tidak dianggap memenuhi kewajibannya, maka ada pihak yang harus memaksanya. Dasar pemikiran sistem ini adalah sebeb-bebasnya pers harus bisa bertanggung jawab kepada masyarakat tentang apa yang diaktualisasikan.

Pers Komunis Soviet

Teori pers komunis social baru tumbuh dua tahun setelah revolusi oktober 1917 di Rusa dan berakar pada teori pers authoritarian. Berkembang karena munculnya Negara Uni Soviet yang berpaham komunis pada awal abad ke-20. Sistem ini dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx tentang perubahan sosial yang diawali oleh Dialektika Hegel (mengatakan bahwa tak ada bidang-bidang realitas maupun bidang-bidang pengetahuan yang terisolasi/berdiri sendiri; semua saling terkait dalam satu gerak penyangkalan dan membenaran. Sesuatu itu hanya benar apabila dilihat dengan seluruh hubungan).

Pers dalam sistem ini merupakan alat pemerintah atau partai dan menjadi bagian integral negara. Pers menjadi alat atau organ partai yang berkuasa (partai komunis Uni Soviet/PKUS). Dengan demikian, segala sesuatu ditentukan oleh negara (partai). Kritik diijinkan sejauh tidak bertentangan dengan ideologi partai. Media massa melakukan yang terbaik untuk partai yang ditentukan oleh pemimpin PKUS. Bagi Lenin (penguasa Soviet pada waktu itu) pers harus melayani kepentingan kelas dominan dalam masyarakat, yakni proletar. Pers harus menjadi collective propagandist, collective agitator, collective organizer. Adapun kaum proletar diwakili oleh partai komunis.

Metode Penelitian

Dalam paper ilmiah ini, penulis berfokus kepada kondisi pers saat ini pada surat kabar harian umum republik yang dikaitkan dengan *four theory of the press*. Paper ilmiah yang bersifat kualitatif cenderung bersifat deskriptif karena berusaha untuk memberikan gambaran/penjelasan dengan menggunakan kata-kata, serta menyajikan persoalan atau garis besar tahapan. Teori yang di pakai dalam paper ilmiah ini adalah *four theory of the press* (4 teori pers).

Hasil Penelitian

Abdul Manan ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, acara diskusi daring “Ethics and Freedom of the Press” yang belum lama ini diadakan mengemukakan bahwa kebebasan pers di Indonesia belum berkembang sesuai harapan oleh karena itu sistem korup yang masih berjalan membuat Lembaga negara tidak berfungsi dengan baik, wartawan mengalami kemiskinan yang masih menjerat, dan ketakutan yang berupa kekerasan atau ancaman fisik maupun non-fisik masih menjadi suatu keresahan bagi wartawan. Kebebasan pers atau kebebasan berpendapat di Indonesia memang belum sepenuhnya mengalami perkembangan yang signifikan untuk saat ini, namun, seorang guru besar di Amerika berpendapat, yang telah mengamati perkembangan pers di Indonesia selama seperempat abad, kebebasan pers di Indonesia mengalami kemajuan dibandingkan dengan masa sebelum era reformasi.

Model efek komunikasi massa, pers diasumsikan memiliki pengaruh positif ataupun negative. Melalui pemberitaan yang berimbang, pers dapat membantu masyarakat menjelaskan situasi yang sedang

bergejolak, di sisi lain, melalui pemberitaan yang tidak akurat, pers dapat menambah eskalasi konflik yang sedang terjadi. Sementara itu, dalam kondisi keterpurukan bangsa saat ini, pers Indonesia ditengarai menyikapinya dengan menampilkan kecenderungan pemberitaan mengarah isu-sisu politik yang hangat, kontroversial, dan penuh sensasi. Peristiwa yang langsung berkaitan dengan realitas masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, degradasi moral, dan lain-lain, malah luput dari perhatian pers. Gejala ini memperlihatkan pers Indonesia belum sepenuhnya berpihak terhadap masyarakat. Padahal, fungsi pers paling utama justru melayani public. Pers Indonesia ditengah euphoria kebebasan pers saat ini, karenanya perlu menengok kembali undang-undang, kode etik, atau pun standar profesional yang menempatkan masyarakat sebagai titik tolak pengabdianya baik dari segi jurnalistik, isi media, narasumber, maupun control sosial.

Kebebasan Pers Indonesia masih berada pada peringkat 119 pada 2020, sehingga jauh di bawah Timor Leste yang menempati posisi 78 dan Malaysia 101. Seperti semua orang tahu, di bawah Suharto, media, jurnalisme, pers di Indonesia sangat dikontrol oleh pemerintah. Ada banyak peraturan, undang-undang pers yang sangat kaku dan keras. Para wartawan kurang bebas untuk menulis dengan baik tentang banyak hal dan ini tidak baik untuk masyarakat Indonesia karena masyarakat perlu informasi yang benar dari jurnalisme supaya mereka tahu apa yang sedang terjadi. Media massa di jaman sekarang ini memang lebih mengedepankan bersaing ketat mencari *profit* (keuntungan), bahkan tidak sedikit pemilik modal kuat ikut mengambil bagian dalam perusahaan media massa. Kondisi tersebut membuat anggota konglomerasi pers tidak lagi memiliki 'kemerdekaan' menentukan dirinya sendiri. Pada akhirnya pemilik modal yang menentukan proses komunikasi dari peliputan informasi, pengemasan hingga pemasaran informasi. Media cetak berusaha memberikan informasi yang dikemas dalam bentuk barang cetakan seperti koran dan majalah. Banyaknya surat kabar yang terbit tentunya memunculkan persaingan dengan media massa lain. Di sini surat kabar tidak hanya bersaing dengan sesama surat kabar, tetapi juga dengan media massa yang berupa televisi dan radio.

Surat kabar harian Republika adalah koran nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim bagi republic Indonesia. Harian umum republika diterbitkan atas kehendak mewujudkan media massa yang mampu mendorong bangsa menjadi kritis dan berkualitas, yaitu bangsa yang mampu sederajat dengan bangsa maju lain di dunia, memegang nilai-nilai spiritualitas dengan wujud Pancasila sebagai filsafat bangsa, serta memiliki arah gerak seperti digariskan UUD 1945. Koran ini identik dengan ICMi karena memang didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dikalangan masyarakat Republika dikenal sebagai Koran nasional yang mengakomodasi kepentingan Islam. Sebagian besar pemberitaannya masih mengakomodasi kepentingan Islam. Republika menampilkan Islam dari sisi yang lebih Humanis, kosmopolis dan inklusif, sehingga mampu berdialog dengan berbagai pihak. Materi yang ditampilkan terkesan damai dan menggunakan pendekatan yang lebih rasional. Dari karakter jurnalis Republika tersebut memang cenderung homogen dan didominasi oleh orang muslim. Oleh karena itu maklum jika nantinya Republika akan bereaksi sebagai kesadaran solidaritas Islam.

Jurnalistik terdapat 2 teori yang sudah lama, yaitu Bill Kovach dan Tom Rosentiels, yang mendeklarasikan elemen utama jurnalisme adalah pada pencarian kebenaran. Ironisnya, kebenaran adalah sesuatu yang abstrak dan sulit didefinisikan, bahkan cenderung kontroversial. Kebenaran sangat subjektif. Makanya, untuk menghindari multitafsir tentang kebenaran yang disodorkan jurnalistik, Kovach dan Rosentiels, menambahkan elemen kedua jurnalistik, yaitu loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga negara. Berita sebagai produk jurnalistik harus menyangkut dan untuk kepentingan masyarakat. Sampai di sini pun masih terjadi perdebatan. Warga negara yang mana yang harus dijadikan loyalitas utama jurnalistik, sebab warga negara juga memiliki kebenaran masing-masing. dalam karya ilmiah ini kita akan membahas *Four Theories of The Press*, Keempat teori pers itu adalah teori pers otoriter, teori pers liberal, teori pers tanggung jawab sosial, dan teori pers komunis Uni Soviet. Surat kabar harian umum republika termasuk dalam beberapa teori yang terdapat didalam 4 teori pers akan mengacu kepada media republika.

Pertama, *authoritarian theory* yang mendukung kebijakan pemerintah dan mengabdikan kepada negara. Surat kabar harian umum republik yang tidak bergantung terhadap pemerintah dan tidak mendukung kebijakan apapun dari pemerintah dikarenakan surat kabar harian umum republik berdiri sendiri tanpa ada campur tangan oleh pemerintah. Teori otoriter mengenai fungsi dan tujuan masyarakat menerima dalil-dalil yang menyatakan bahwa pertama-tama seseorang hanya dapat mencapai kemampuan secara penuh jika ia menjadi anggota masyarakat. Sebagai individu lingkup kegiatan benar-benar terbatas, tetapi sebagai anggota masyarakat kemampuannya untuk mencapai suatu tujuan dapat ditingkatkan tanpa batas. Atas dasar asumsi inilah, kelompok lebih penting daripada individu, karena hanya melalui kelompok seseorang dapat mencapai tujuannya.

Penguasa-penguasanya menggunakan pers untuk memberi informasi kepada rakyat tentang kebijakan-kebijakan penguasa yang harus didukung. Hanya dengan izin khusus pers boleh dimiliki oleh swasta, dan izin ini dapat dicabut kapan saja terlihat tanggung jawab mendukung kebijaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan. kegiatan penerbitan dengan demikian merupakan semacam persetujuan antara pemegang kekuasaan dengan penerbit, dimana pertama memberikan sebuah hak monopoli dan yang terakhir memberikan dukungan. tetapi pemegang kekuasaan mempunyai hak untuk membuat dan merubah kebijaksanaan, hak memberi izin dan kadang-kadang menyensor. Jelas bahwa konsep pers seperti ini menghilangkan fungsi pers sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan dan juga dalam menyampaikan kebenaran objektif kepada masyarakat. Praktek – praktek otoritarian masih ditemukan di seluruh bagian dunia walaupun telah ada dipakai teori lain, dalam ucapan walaupun tidak dalam perbuatan, oleh sebagian besar negara komunis

Surat kabar harian umum republik mengedepankan fungsi dan tujuan yang ada didalam teori otoriter. Jika surat kabar harian umum memakai teori otoriter ini banyak sekali perselisihan antara media dan pemerintah, dan banyak kekurangan yang akan di terima oleh surat kabar harian umum republik. Beberapa kekurangan yang akan di terima republik jika media nya mendukung pemerintah, yaitu tertutupnya kesempatan untuk berkreasi, mudah terjadi pembredelan penerbitan media yang cenderung menghancurkan suasana kerja dan lapangan serta penghasilan yang telah mapan, dan adanya penekanan terhadap keinginan untuk bebas mengemukakan pandangan / pendapat.

Teori otoriter jika dikaitkan dengan kondisi pers saat ini mungkin akan menjadikan suatu senjata bagi media, media bisa dikendalikan secara bebas oleh pemerintah dalam kondisi yang seperti ini. Ada beberapa media massa lebih mendukung segala kebijakan pemerintah, memberitakan segala sesuatu yang baik tentang pemerintah atau bisa menerbitkan berita dan peristiwa umum yang sudah di edit baik ditambahkan maupun bisa dikurangi oleh pemerintah. Jika teori otoriter di gunakan oleh surat harian umum republik maka kebebasan pers dibatasi, berita yang di terbitkan hanya isu-isu atau opini-opini dari pemerintah bukan dari masyarakat.

Pers adalah alat bagi pemerintah atau penguasa untuk menambah kekuatan atau memperkuat pembuat kebijakan dalam suatu Negara. Pemerintah atau penguasa berhak untuk memberikan izin bagi media apapun dan mengendalikannya dengan cara menerbitkan izin kepada media dan membuat sensor. Jika diketahui ada media yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah, maka pihak pemerintah atau penguasa berhak untuk membatalkan izin tersebut dan membekukannya. Pemerintah berhak untuk menolak berbagai isu sensitif yang coba diangkat oleh pers untuk menjaga stabilitas nasional. Penyensoran yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa adalah bentuk penekanan terhadap berbagai bentuk komunikasi yang dapat mengancam masyarakat, raja, pemerintahan, dan bangsa. Secara khusus metode penyensoran sangat dikenal dalam pers yang menentang kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi. Dalam beberapa kasus, sensor yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dapat membantu melindungi pembuat kebijakan dan otoritas dari berbagai isu sensitif. Terdapat beberapa jenis sensor, yaitu sensor politis, sensor moral, sensor agama, sensor militer, dan sensor perusahaan.

Dilihat dari latar belakang surat kabar harian umum republika sendiri yang berlandaskan dari komunitas kalangan muslim Indonesia tentu saja republika akan dibatasi pemberitaan tentang islam oleh pemerintah. Dikarenakan, pemerintah yang mengendalikan media tersebut sehingga wewenang bukan pada media nya itu sendiri melainkan pemerintah, selama pandangan yang dikemukakan tidak mengancam pemerintah masih diperbolehkan. Teori yang seringkali disebut sebagai sistem otoriter berkaitan erat dengan sistem pengawasan terhadap media massa yang daya pengaruhnya dinilai amat kuat, sehingga pers dijuluki *the four estate* (kekuasaan keempat) setelah Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif masing-masing diakui sebagai kekuasaan pertama, kedua, dan ketiga.

Kedua, *libertarian theory* ini dipakai oleh surat kabar harian umum republika dikarenakan memberi landasan kebebasan yang tak terbatas kepada pers, banyak memberikan informasi, hiburan, dan berita seputar islam. Akan tetapi republika tidak hanya menciptakan keuntungan bagi media nya sendiri. Surat kabar harian umum republika bukan sebagai alat pemerintah dan harus menjadi mitra dalam upaya kebenaran. kebenaran adalah sesuatu yang abstrak dan sulit didefinisikan, bahkan cenderung kontroversial. Kebenaran sangat subjektif. Makanya, untuk menghindari multitafsir tentang kebenaran yang disodorkan jurnalistik, Kovach dan Rosentiels, menambahkan elemen kedua jurnalistik, yaitu loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga negara. Berita sebagai produk jurnalistik harus menyangkut dan untuk kepentingan masyarakat. Sampai di sini pun masih terjadi perdebatan. Warga negara yang mana yang harus dijadikan loyalitas utama jurnalistik, sebab warga negara juga memiliki kebenaran masing-masing.

Pers dalam negara yang menganut paham libertarianisme harus menjadi mitra dalam upaya pencarian kebenaran dan bukan sebagai alat pemerintah. Pers dituntut untuk mengawasi pemerintah. Maka lahir istilah pers sebagai *The Fourth Estate* atau pilar kekuasaan keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Oleh karenanya pers harus bebas dari pengaruh dan kendali pemerintah.

Pers dituntut untuk mengawasi pemerintah, oleh karena nya pers harus bebas dari kendali pemerintah. Teori liberal punya fungsi pers yang mengabdikan kepada sistem politik dalam menyajikan informasi, diskusi dan debat mengenai peristiwa umum, akan tetapi republika tidak menjalankan fungsi tersebut dikarenakan surat kabar harian umum republika tidak menjadi media yang mengedepankan perdebatan atau untuk berdiskusi. Republika hanyalah media yang memberitakan sesuai kebenaran yang berada di lapangan / peristiwa umum. Kelebihan yang di dapat dari republika adalah memiliki kebebasan pers / kebebasan berpendapat, dan dapat menghindari kontrol dari pemerintah. Akan tetapi republika jika menjalankan dari teori liberal ini akan mendapati kekurangan yaitu sangat optimis bahwa media dengan sadar memiliki tanggung jawab, mengabaikan konflik yang muncul dari kebebasan mencari kebenaran.

Teori liberal memandang bahwa orang-orang adalah pemikir rasional dan pemikiran rasional mereka menuntun mereka menemukan apa yang baik dan apa yang buruk. Pers hendaknya tidak membatasi apapun termasuk isi yang bersifat negatif yang dapat memberikan pengetahuan dan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam situasi terburuk.

Fungsi dari teori liberal mencakup beberapa aspek yaitu : a) Mengabdikan kepada sistem politik dengan menyajikan informasi, diskusi dan debat mengenai peristiwa umum; b) Menyebarkan penerangan kepada khalayak agar mampu berpemerintahan sendiri; c) Mengawal hak-hak asasi pribadi dengan mengabdikan kepadanya sebagai penjaga dalam menghadapi pemerintah; d) Mengabdikan kepada sistem ekonomi, terutama dengan jalan memper satukan para pembeli dan penjual barang dan jasa melalui media periklanan; e) Menyajikan hiburan; f) Mengusahakan dana bagi kebutuhan sendiri sehingga bebas dari tekanan pihak yang berkepentingan. Point yang di jalankan oleh republika terdapat pada point b, c, d, dan f.

Semua pendapat harus dapat kesempatan yang sama untuk didengar, harus ada pasar bebas pemikiran-pemikiran dan informasi. Baik kaum minoritas maupun mayoritas, kuat maupun lemah, harus dapat menggunakan pers. Selain memberi hak warga untuk bersuara dan kontrol sosial, pers dalam paham libertarianisme bertugas (1) melayani kehidupan politik, (2) mencari keuntungan, (3) member hiburan.

Perjuangan untuk mengakui prinsip-prinsip liberal yang mempengaruhi pers itu. Mencapai puncaknya dengan diformulasikan dan diterimanya Bill of Rights yang mencakup peraturan-peraturan yang menetapkan kebebasan pers, meski tidak tegas sehingga menimbulkan berbagai interpretasi. Dari sejumlah butir yang tercakup oleh Bill of Rights itu, hanya satu butir yang tampaknya diterima tanpa interpretasi, yakni bahwa kebebasan pers tidak mutlak, melainkan dapat dikenakan pembatasan yang bagaimana yang dapat dikenakan pembatasan; tetapi pembatasan yang bagaimana yang dapat dikenakan kepada pers, dalam liberalisme menjadi permasalahan.

Ketiga, *social responsibility theory* dasar pemikiran utama teori ini adalah bahwa kebebasan dan kewajiban berlangsung secara beriringan, dan pers yang menikmati kedudukan dalam pemerintah yang demokratis, berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsi tertentu yang hakiki. Fungsi-fungsi dalam teori ini bertanggung jawab pada dasarnya adalah sama dengan fungsi-fungsi dalam teori liberal. Teori tanggung jawab social merefleksikan ketidakpuasannya mengenai interpretasi terhadap fungsi-fungsi tersebut beserta pelaksanaannya yang dilakukan para pemilik dan para petugas pers. Berkaitan dengan surat kabar harian umum republika sangat bertanggung jawab menjalankan fungsi teori ini, republika mengedepankan tanggung jawab social nya dengan mendirikan program yang menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat pembacanya, program ini juga diwujudkan sebagai bentuk partisipasi dalam menyukseskan program yang mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Teori ini diberlakukan sedemikian rupa oleh beberapa sebagian pers. teori tanggungjawab social punya asumsi utama 4 bahwa kebebasan pers mutlak, banyak mendorong terjadinya dekadensi moral. oleh karena itu, teori ini memandang perlu adanya pers dan sistem jurnalistik yang menggunakan dasar moral dan etika. asal saja pers tau tanggung jawab nya dan menjadikan itu landasan kebijaksanaan operasional mereka, maka system libertarian akan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat.

Tanggung jawab ini diantaranya adalah kewajiban untuk memberikan informasi dan diskusi kepada publik tentang masalah-masalah sosial yang penting dan menghindari aktivitas-aktivitas yang merugikan masyarakat. Teori ini membebaskan pers tanpa sensor namun di saat yang bersamaan isi pers hendaknya didiskusikan dalam panel publik dan media harus menerima berbagai masukan dari berbagai pihak.

Teori tanggung jawab sosial berada diantara teori otoriter dan teori pers bebas karena teori ini memberikan kebebasan menyeluruh bagi media di satu sisi dan kendali eksternal di sisi yang lain. Dalam teori tanggung jawab sosial, kepemilikan media adalah pribadi. Teori ini bergerak dari pelaporan obyektif ke pelaporan interpretatif. Teori tanggung jawab sosial membantu terciptanya profesionalisme dalam media dengan mengatur akurasi, kebenaran, dan informasi ke tingkatan yang tinggi. Berdasarkan tanggung jawab sosial media, Komisi Kebebasan Pers bertugas untuk menyusun kode etik pers, memperbaiki standar jurnalisme, menjaga wartawan serta minat jurnalisme, mengkritisi dan membuat hukuman bagi pelanggaran kode etik wartawan.

Kondisi pers saat ini haruslah menunjukkan kebenaran yang terjadi di Indonesia, memberitahu ke masyarakat dengan cara memberi nilai-nilai norma yang ada. Republika memberitakan peristiwa-peristiwa sehari-hari dengan benar, lengkap dan bepercerti dalam konteks yang mengandung makna. Berkesinambungan dengan teori ini, republika memberikan pelayanan sebagai forum yang menampung aspirasi masyarakat. Memproyeksikan gambaran yang mewakili kelompok inti dalam masyarakat, serta bertanggung jawab atas penyajian yang disertai penjelasan mengenai tujuan dan nilai-nilai masyarakat.

Dilema yang muncul atas kebebasan mencari kebenaran dalam teori liberal menjadikan muncul nya teori tanggung jawab social, maka dari itu republika mengacu kepada teori liberal karna terkoneksi dengan teori tanggung jawab social. Republika memang sangat mengedepankan tanggung jawab nya sebagai media massa cetak yang mengayomi masyarakat dan menampung semua aspirasi masyarakat serta kebebasan berpendapat. Republika tidak bisa hanya bebas mengemukakan pendapat dan bebas mencari kebenaran, namun harus ada tanggung jawab social, dikarenakan apa yang disampaikan melalui surat kabar republika selalu memiliki efek atau dampak terhadap masyarakat yang membacanya.

Republika senantiasa selalu menggandengkan tanggung jawab dengan kata social yang berupaya menunjukkan pada suatu konsep tentang kewajiban media untuk mengabdikan terhadap kepentingan masyarakat. Keadaan pers saat ini memang harus melihat apa yang menjadi kepentingan dimasyarakat, akhir-akhir ini mungkin banyak keluhan atau kritikan terhadap pemberitaan. Memberitakan tentang keadaan hukum di Indonesia yang dilihat semakin runyam, masyarakat tentu saja akan khawatir akan hukum di Indonesia semakin tidak baik. Apapun berita yang di bagikan ke masyarakat oleh republika itu kebenaran disertai penjelasan agar masyarakat yang membacanya tidak salah tafsir dengan pemberitaan / kejadian yang sedang terjadi.

tanggung jawab media dalam teori tanggung jawab sosial sulit untuk dioperasionalkan, akibat rumitnya tarik ulur antara kepentingan pemerintah dan pemilik atau para jurnalis yang bergerak dalam media bersangkutan. Oleh karena itu, sistem ini berada di ambang kesemuan antara sistem otoriter dan libertarian. Maksudnya, jika pemerintah ikut campur dalam merumuskan fungsi, tugas dan wewenang media sebagai ekspresi tanggung jawabnya, maka sistem ini menyerupai otoritarian. Sebaliknya, jika para jurnalis dan media itu sendiri yang merumuskannya secara mandiri, maka sistem itu bergerak ke arah liberatarian. Teori yang sempat menjadi teori normatif di Amerika Serikat pada tahun 1940-an ini menghadapi kendala utama yaitu "tidak menguntungkan". Misalnya dalam menyuarakan suara kaum minoritas dan menyeimbangkan pemberitaan yang terlalu bersifat drama, Kritikus media Gaye Tuchman dan W. Lance Bennet (dalam Baran & Davis, 2012:129) menyatakan hal yang seperti itu tidak disukai pengiklan secara demografis.

Keempat, *the soviet communist theory* Nama lain dari teori media Soviet adalah Teori Media Soviet Komunis. Teori media Soviet berasal dari postulat dasar Karl Marx dan Engles serta prinsip-prinsip Lenin. Pemerintah mengambil alih kendali atau kontrol seluruh media dan komunikasi untuk melayani kelas pekerja dan kepentingannya. Teori ini berpendapat bahwa Negara memiliki kekuasaan absolut untuk mengontrol media apapun untuk keuntungan atau manfaat bagi masyarakat. Negara mengambil alih kepemilikan pers swasta dan media lainnya. Media pemerintah menyediakan pemikiran positif untuk menciptakan masyarakat yang disosialisasikan dengan kuat serta menyediakan informasi, pendidikan, hiburan, motivasi, dan mobilisasi. Teori media Soviet menggambarkan keseluruhan tujuan media massa yaitu untuk mengedukasi massa kelas pekerja yang lebih besar.

Sistem pers ini menopang kehidupan sistem sosialis Soviet Rusia dan memelihara pengawasan yang silakukan pemerintah terhadap segala kegiatan sebagaimana biasanya terjadi dalam kehidupan komunis. sebab itu, di negara-negara tersebut tidak terdapat pers bebas, yang ada hanya pers pemerintah. Seagala sesuatu yang memerlukan keputusan dan penetapan umumnya dilakukan oleh para pejabat pemerintah sendiri. Partai komunis memiliki kekuatan organisasi ini, partai tidak hanya menyelipkan dirinya sendiri ke posisi pemimpin massa, dalam pengertian yang sesungguhnya, partai menciptakan massa dengan mengorganisasikan dengan membentuk organ-organ akses dan kontrol yang merubah sebuah populasi tersebar menjadi sebuah sumber kekuatan termobilisir.

Tugas pokok pers dalam sistem pers komunis adalah menyokong, menyukseskan, dan menjaga kontinuitas system social soviet atau pemerintah partai. Dan fungsi pers komunis itu sendiri adalah memberi bimbingan secara cermat kepada masyarakat agar terbebas dari pengaruh-pengaruh luar yang dapat menjauhkan masyarakat dari cita-cita partai. antara teori totalitarian dengan teori otoritarian sama-sama menggunakan kata kebebasan untuk masyarakat. namun kebebasan masyarakat bagi otoritarian adalah kepentingan bisnis, sedangkan bagi totalitarian berarti kepentingan partai. Dalam hal ini, pers soviet harus melakukan apa yang terbaik bagi partai dan mendukung partai sebagai sikap dan perbuatan moral yang berorientasi pada kepentingan rakyat manifestasi kehendak rakyat.

Republika tidak memakai teori ini dikarenakan jika teori ini dijalankan maka media akan diawasi oleh pemerintah, topik yang diangkat tidak lagi menjadi topik utama dalam berita, mungkin yang menjadi utama nya adalah perkembangan dan perubahan masyarakat dan tidak ada lagi keuntungan dari

media nya.bahkan republika hendaknya melayani kepentingan dari, dan berada di bawah pengendalian kelas pekerja. Dalam keuntungan / profit hendaknya tidak dimiliki secara pribadi. Maka republika harus melakukan fungsi positif bagi masyarakat dengan sosialisasi terhadap norma yang diinginkan, pendidikan, informasi, motivasi, mobilisasi. Di dalam tugas menyeluruhnya bagi masyarakat, media hendaknya tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan audiensnya. Jika republika memakai teori ini akan menemui banyak kekurangan nya dan punya banyak hambatan dalam membagikan informasi.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penulis yaitu Surat kabar harian umum republika tidak bisa sepenuhnya dikaitkan menggunakan *four theory of the press* karena ada beberapa aspek yang bertentangan dalam hal penyiarannya yang menyinggung kode etik penyiaran di Indonesia. Pers Indonesia harus lebih berpihak kepada masyarakat tentang kebenaran – kebenaran yang ada di Indonesia baik atau buruk kebenaran harus tetap di sampaikan kepada masyarakat luas khususnya di Indonesia agar masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian dari pada itu pers diharapkan tidak terlalu mementingkan kepentingan kaum atas seperti pemerintahan kaum pejabat contohnya seperti saat Pilkada yang lebih condong kepada sang pemilik suatu media saat dirinya menjadi salah satu kandidat.

Daftar Pustaka

- Abraham, F. Z. (2014). Pemanfaatan Media Online Terhadap Interaksi Sosial Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*
- Aguswandi, A., Cangara, H., & Sultan, M. (2019). Konstruksi Pemberitaan Partai Perindo di iNews TV. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 1(2), 142-154. doi:<https://doi.org/10.25008/jpi.v1i2.19>
- Aziz, Abd (2017). *Sistem Teori dan Orientasi Pers*. <https://kumparan.com/mediamadura/sistem-teori-dan-orientasi-pers/full>
- Badri, Muhammad (2017) *Inovasi Jurnalisme Data Media Online di Indonesia*.
- Hapsari, P. (2019). Akun Instagram @Nurhadi_Aldo: Kritik Fenomena Sosial. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 1(1), 43-47. doi:<https://doi.org/10.25008/jpi.v1i1.5>
- Hasanti, I. (2021). Hambatan Komunikasi Event Project Team dengan Account Executive pada Perusahaan Jasa Event Organizer Twisbless. *Journal of Servite*, 1(2), 37 -48. <https://doi.org/https://doi.org/10.37535/102001220195>
- Kholisoh, N. (2021). Penyuluhan Literasi Media tentang Dampak Pornografi bagi Remaja Badui Luar di Desa Kanekes, Lebak - Banten. *Journal of Servite*, 1(2), 20 - 29. <https://doi.org/https://doi.org/10.37535/102001220193>
- Lestari, P., Ritonga, R., Ruliana, P., & Barus, C. C. B. (2020). Disaster communication uses field training exercise simulation as an important aspect of disaster risk reduction. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 36(1).
- Mahrani, M., Ruliana, P., & Ritonga, R. (2020). Building the Image of Semarang City through Motocross World Championship. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 5(2), 243-253. doi:<https://doi.org/10.25008/jkiski.v5i2.423>
- Natalia, E. (2020). Membangun Kesadaran Diri Generasi Muda akan Budaya Positif Melal Penggunaan Media Sosial. *Journal of Servite*, 2(2), 20 - 31 <https://doi.org/https://doi.org/10.37535/102002220203>
- Nurhajati, L., & Wijayanto, X. (2019). Kepemilikan Media dan Isi Pemberitaan Koran Tempo. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 1(1), 1-14. doi:<https://doi.org/10.25008/jpi.v1i1.1>
- Pangaribuan, O., & Irwansyah, I. (2019). Media Cetak Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 1(2), 119-130. doi:<https://doi.org/10.25008/jpi.v1i2.11>
- Puspitasari, W., & Istiyanto, S. (2019). Pemberitaan Bias Gender dalam Kasus Prostitusi Online. *Jurnal*

- Pewarta Indonesia*, 1(1), 76-81. doi:<https://doi.org/10.25008/jpi.v1i1.9>
- Ritonga, R., Murwani, E., & Ritonga, S. (2017). Gender Awareness of Maria Hartiningsih as Kompas Reporter. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 2(2), 82-91. doi:<https://doi.org/10.25008/jkiski.v2i2.102>
- Ritonga, R., Nugroho, E., & Handoko, D. (2019). Struggle of meaning and the Jokowi myth in the 2018 asian games opening video. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 35(1).
- Ritonga, R., & Syahputra, I. (2019). Citizen journalism and public participation in the era of new media in Indonesia: From street to tweet. *Media and Communication*, 7(3), 79-90.
- Sahputra, D. (2020). Kompetensi Wartawan dalam Liputan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 2(2), 97-105. doi:<https://doi.org/10.25008/jpi.v2i2.42>
- Sunuantari, M., & Gunawan, I. (2021, January 16). Diseminasi Informasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi. *Journal of Servite*, 2(1), 47 - 57. <https://doi.org/https://doi.org/10.37535/102002120205>
- Wahdaniah, I., Toni, A., & Ritonga, R. (2020). Makna Logo Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 3(01), 67-74
- Wirasahidan, J. (2019). Brand Community: Pola Komunikasi dalam Menjaga Keutuhan Kelompok. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 1(2), 82-90. doi:<https://doi.org/10.25008/jpi.v1i2.12>
- Yanuar, D. (2020). Peran Media Baru dalam Mengubah Perilaku Perokok Tembakau ke Rokok Elektrik di Kota Banda Aceh. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 2(1), 62-77. doi:<https://doi.org/10.25008/jpi.v2i1.31>